

Analisis Hambatan Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Administrasi Negara Yang Efektif Di Tingkat Global

¹Erinaldi, ²Yesi Mala Sari, ³Rizky Mardeansyah, ⁴Sulis Pratiwi, ⁵Naya Khairunnisa

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Korespondensi : erinaldipratama2905@gmail.com

Abstrak

Pasar tradisional merupakan institusi ekonomi yang berperan penting dalam mendukung aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menilai berbagai tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital, dengan penekanan pada penerapan e-government sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan. Tahapan analisis dilakukan dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi negara berperan dalam mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi informasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketimpangan akses digital antarwilayah, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta budaya birokrasi yang cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang strategis, antara lain melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, inovasi dalam pengelolaan informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.

Kata kunci : Transformasi Digital, Administrasi Negara, E-Government, Tantangan, Peluang.

Abstract

This study aims to examine and assess the challenges and opportunities within Indonesia's public administration system in the digital era, particularly emphasizing the implementation of e-government as a means to improve governance effectiveness. The research employs a descriptive qualitative approach, using a literature study method by reviewing various academic sources such as scholarly journals, books, and relevant policy documents. The analytical process involves reviewing, categorizing, and interpreting the data based on the main focus of the study. The findings indicate that the use of digital technology in public administration contributes to accelerating bureaucratic processes, enhancing transparency, and improving the quality of public service delivery. However, the implementation of digitalization has not been fully optimized due to several challenges, including limited technological infrastructure, unequal digital access across regions, disparities in human resource capacity, and a bureaucratic culture that is less adaptive to change. On the other hand, digital advancement also offers strategic opportunities, such as strengthening electronic governance systems, fostering innovation in information management, and increasing public participation in policymaking processes.

Keyword: Digital Transformation, Public Administration, E-Government, Challenges, Opportunities

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan di berbagai negara. Salah satu wujud dari perubahan tersebut adalah penerapan *e-government*, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan administrasi negara. *E-government* dianggap sebagai instrumen strategis yang mampu meningkatkan kinerja birokrasi,

mempercepat proses pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Aw, 2024).

Penerapan *e-government* tidak hanya dipandang sebagai sarana modernisasi dalam administrasi negara, tetapi juga sebagai strategi penting dalam reformasi pelayanan publik yang berpotensi mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* memiliki peluang besar dalam meningkatkan keterbukaan birokrasi serta kualitas pelayanan publik, terutama melalui kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan penyempurnaan proses internal dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mappisabbi, Haris, & Zuhri, 2024). Meskipun peluang tersebut cukup besar, realisasinya tidak dapat tercapai secara otomatis tanpa adanya dukungan dari berbagai faktor pendukung yang memadai. Dalam banyak kasus, pelaksanaan *e-government* di negara berkembang masih dihadapkan pada sejumlah kendala utama, seperti adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam memahami maupun mengoperasikan sistem berbasis digital (Achdiat, 2025).

Tabel I.1
Indeks Perkembangan E-Government Global

No	Kategori	Nilai Rata-rata
1.	Sangat Tinggi	0,82
2.	Tinggi	0,65
3.	Menengah	0,48
4.	Rendah	0,35

Sumber Data: United Nations E-Government Survey 2024/2025

Dalam konteks administrasi negara modern, efektivitas menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara yang efektif ditandai dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, serta efisien. Oleh karena itu, implementasi *e-government* diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan birokrasi tradisional seperti lambatnya proses pelayanan dan kurangnya transparansi (Iryanto et al., 2024). Hambatan struktural dan budaya organisasi birokrasi juga sering menjadi penghambat karena transformasi digital menuntut perubahan pola pikir serta adaptasi kerja yang belum sepenuhnya terjadi dalam aparatur pemerintahan. Selanjutnya, tantangan lain yang ditemukan adalah integrasi antar-sistem digital di berbagai unit pemerintahan yang masih belum optimal, sehingga menyebabkan disparitas layanan dan masih terjadi redundansi administrasi dalam pelayanan publik (Suhartono, Rivai, & Wibowo, 2025).

Secara global, perkembangan *e-government* menunjukkan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan, meskipun kesenjangan antarnegara masih terlihat cukup jelas. Negara-negara maju umumnya memiliki sistem pemerintahan digital yang lebih matang dan terintegrasi dibandingkan dengan negara berkembang. Perbedaan ini mencerminkan bahwa penerapan *e-government* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingkat kesiapan infrastruktur teknologi serta ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki masing-masing negara (Susilawati, Yanti, & Erni, 2023).

Tabel I.2
Akses Internet Global Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah
1.	Pengguna Internet	±5,5 miliar
2.	Belum Terhubung	±2,6 miliar

Sumber Data: ITU Statistics, Tahun 2025

Di samping itu, penerapan *e-government* masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Beberapa hambatan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi, serta belum optimalnya kesiapan aparatur pemerintah dalam mengelola dan mengoperasikan sistem berbasis digital (Kennedy, Surya, & Wartoyo, 2024). Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami berbagai hambatan yang ada (Sarjito et al., 2024).

Di samping itu, isu keamanan data dan resistensi terhadap perubahan organisasi menjadi faktor tambahan yang perlu mendapat perhatian serius agar *e-government* dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan strategis yang komprehensif, termasuk peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung, serta pengembangan kemampuan teknis aparatur untuk mempercepat efektivitas implementasi *e-government* di Indonesia (Aw, 2024).

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode kajian literatur (*literature review*), yang bertujuan untuk mengkaji berbagai hambatan dalam implementasi *e-government* berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan (Suhartono et al., 2025). Meskipun telah merancang dan mengembangkan berbagai program *e-government* secara strategis sebagai bagian dari upaya reformasi pelayanan publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan yang cukup kompleks dan tidak dapat diabaikan. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Indonesia mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama melalui peningkatan efisiensi dalam proses administrasi, kemudahan dalam memperoleh informasi, serta penguatan akuntabilitas layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sugianti et al., 2024).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerapan *e-government* di berbagai negara (Alfaridzah, Firlana, & Astuti, 2025). Namun sekaligus, penelitian-penelitian terbaru juga mengungkapkan berbagai hambatan struktural yang masih membatasi optimalisasi *e-government*, misalnya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sistem digital, serta rendahnya partisipasi publik dalam penggunaan layanan online pemerintah. Di samping itu, kajian bibliometrik menunjukkan perkembangan *e-government* di Indonesia masih memiliki dinamika yang beragam secara geografis dan sektoral, mencerminkan disparitas penerapan serta perbedaan kematangan digital antar lembaga pemerintahan (Abdussamad, Karinda, Nursin, & Sandewa, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti (Syarif et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun

e-government merupakan alat strategis untuk memperbaiki kualitas pemerintahan digital di Indonesia, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat, peningkatan kapasitas teknis aparat, serta perluasan literasi digital di masyarakat agar dampak positif e-government dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua wilayah tanah air. Dengan pemahaman ini, kajian lebih lanjut terhadap tantangan dan peluang penerapan e-government menjadi penting untuk mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif dan pemerintahan yang akuntabel di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *e-government* di berbagai negara menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi negara. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga mencakup faktor organisasi serta kondisi lingkungan eksternal. Salah satu permasalahan utama yang sering ditemui adalah belum meratanya ketersediaan infrastruktur digital. Ketimpangan ini mengakibatkan layanan *e-government* belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar terutama bagi negara berkembang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital (Aurabillah, Putri, Fadhlilla, & Wulansari, 2024).

Selain hambatan infrastruktur dan sumber daya manusia, *implementasi e-government di Indonesia* juga menghadapi sejumlah kendala lain yang secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi pemerintahan. Pertama, penyebaran layanan digital pemerintah masih belum merata secara geografis di Indonesia, sehingga akses masyarakat terhadap layanan online seperti perizinan atau informasi publik sangat berbeda antar wilayah kota dan desa akibat keterbatasan jaringan serta perangkat teknologi (Nurhidayat, Nurmandi, & Misran, 2024). Kurangnya integrasi data antarlembaga serta pemahaman teknis tentang aspek keamanan informasi oleh aparaturnegara turut memperlambat proses digitalisasi layanan publik, menunjukkan bahwa dukungan teknis dan jaringan yang memadai masih perlu ditingkatkan secara nasional. Selain itu, penelitian lain mengungkap resistensi organisasi dan perilaku birokrasi tradisional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital, di mana budaya kerja yang masih berfokus pada prosedur konvensional menjadi salah satu faktor penghambat perubahan operasional ke sistem digital.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi kendala dalam penerapan *e-government*. Aparatur pemerintah yang belum memiliki kompetensi digital yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi, sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal (Pakpahan, 2026). Sejumlah bukti empiris dari kajian ilmiah menunjukkan bahwa *implementasi e-government* telah membawa dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia, namun tetap dihadapkan pada tantangan multi-dimensi yang memengaruhi efektivitas administrasi negara secara menyeluruh (Failasufa, Zahrani, Triasma, & Fuadah, 2026). Misalnya, penelitian terkini menemukan bahwa transformasi digital yang diinisiasi melalui e-government dapat meningkatkan kepuasan layanan publik dengan mempercepat proses birokrasi dan memperluas akses informasi masyarakat, walaupun masih perlu penguatan infrastruktur dan pengembangan kemampuan pengguna untuk memaksimalkan pemanfaatannya (Prihartono, 2023).

Selain itu, evaluasi pada unit layanan administrasi di tingkat kementerian menunjukkan bahwa inovasi seperti digitalisasi arsip, tanda tangan elektronik, serta penerapan chatbot internal mampu meningkatkan efisiensi layanan, namun tantangan seperti integrasi sistem antar unit dan kesiapan kebijakan masih perlu dibenahi. Studi kasus di daerah juga mengungkap bahwa implementasi e-government mampu mempercepat layanan administratif desa serta meningkatkan transparansi

pengelolaan anggaran, menunjukkan bahwa pendekatan inovatif digital dapat memperkuat tata kelola pemerintahan lokal (Mappisabbi et al., 2024).

Hambatan sosial lain seperti rendahnya literasi digital masyarakat terutama pada kelompok usia lanjut dan masyarakat di daerah tertinggal juga membatasi efektifitas e-government karena kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi atau platform digital pemerintah masih rendah. Secara keseluruhan, tantangan tersebut tidak hanya membutuhkan perbaikan teknis, tetapi juga pendekatan strategis yang melibatkan pelatihan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur digital, dan peningkatan keterlibatan publik dalam perancangan layanan agar e-government di Indonesia benar-benar dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang (Kennedy et al., 2024).

Sementara itu, kajian literatur lain menegaskan bahwa kompleksitas regulasi, resistensi organisasi, dan kesenjangan kemampuan digital aparatur merupakan hambatan serius yang memerlukan strategi kebijakan terkoordinasi untuk mengatasi polaritas antar wilayah dan lembaga (Rezaldi, Maulidia, & Pujonggo, 2025). Dalam sektor layanan spesifik seperti administrasi kependudukan dan perizinan di daerah terpencil, temuan menunjukkan bahwa ketidakmerataan infrastruktur dan rendahnya adopsi masyarakat menjadi faktor utama yang memperlambat keberhasilan program e-government (Regina & Kartini, 2025).

Meski demikian, bukti empiris secara umum menegaskan bahwa dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan literasi digital masyarakat, pembaruan kebijakan regulasi, dan komitmen pendanaan berkelanjutan, e-government memiliki potensi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif. (Yazid & Karmila, 2024)

Kesenjangan digital antar negara juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan e-government. Negara maju cenderung lebih siap dalam mengadopsi teknologi dibandingkan negara berkembang, sehingga terjadi perbedaan kualitas pelayanan publik (Wulansari, A., & Inayati, 2019). Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas administrasi negara, khususnya dalam hal efisiensi birokrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengatasi hambatan tersebut agar implementasi e-government dapat berjalan optimal (Aini & Suryani, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-government* memegang peranan krusial dalam mendorong terciptanya sistem administrasi negara yang lebih efektif pada skala global. Penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan terbukti mampu meningkatkan kinerja birokrasi, mempercepat proses layanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, *e-government* tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi semata, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi fundamental dalam sistem administrasi publik modern.

Namun demikian, praktik penerapan *e-government* di berbagai negara masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Salah satu permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur digital, terutama di negara berkembang yang masih mengalami ketimpangan akses teknologi. Kondisi ini menyebabkan layanan publik berbasis digital belum dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Selain itu, adanya kesenjangan digital antarnegara mencerminkan perbedaan tingkat kesiapan dalam mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Di samping itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi *e-government*. Aparatur pemerintah yang belum memiliki keterampilan digital yang

memadai cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem kerja berbasis teknologi, sehingga pelaksanaan *e-government* belum optimal. Tidak hanya itu, sikap resistensi terhadap perubahan dalam lingkungan birokrasi turut memperlambat proses transformasi digital dalam pemerintahan.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi adalah belum terintegrasinya sistem antarinstansi secara optimal serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Hal ini berdampak pada kurang efisiennya pelayanan publik dan belum terwujudnya sistem yang terhubung secara menyeluruh. Dalam konteks global, negara yang mampu mengatasi berbagai kendala tersebut cenderung memiliki sistem administrasi yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Aini & Suryani, 2019).

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *e-government* sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola perubahan organisasi. Tanpa adanya upaya yang terintegrasi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, tujuan mewujudkan sistem administrasi negara yang efektif di era digital akan sulit dicapai secara optimal.

5. SARAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai kendala dalam penerapan *e-government*, dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan optimalisasi sistem administrasi negara berbasis digital di tingkat global. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah mendorong pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi. Ketersediaan jaringan internet yang merata serta penguatan sistem teknologi informasi menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan publik berbasis digital secara inklusif.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi *e-government*. Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan serta program pengembangan kompetensi digital secara berkelanjutan bagi aparatur negara, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan mengelola sistem digital secara efektif. Tidak hanya itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga harus menjadi prioritas. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang luas, masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, pelaksanaan evaluasi secara berkala juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam implementasi *e-government*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi yang konsisten, sistem yang diterapkan dapat tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z., Karinda, K., Nursin, E., & Sandewa, F. (2024). *E-Government di Indonesia : Sebuah Analisis Bibliometrik dan Dampaknya pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik*. 05(02), 1–15.
- [2] Achdiat. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Efektif: Suatu Kajian Literatur Sistematis. *Community Engagement & Emergence Journal*, 6(6), 5021–5036.

- [3] Aini, M. A., & Suryani, E. (2019). *Strategic Planning of Information System / Information Technology (Case Study : Gresik Regency Government Environment)*.
- [4] Alfaridzah, A. L., Firlana, H., & Astuti, R. K. (2025). *Implementasi Dan Dampak Sistem Manajemen Sdm Berbasis E-Government Di Indonesia*. 11(1), 145–156.
- [5] Aurabillah, B., Putri, L. A., Fadhlilla, N. C., & Wulansari, A. (2024). *Implementasi Framework Iso 27001 Sebagai Proteksi Keamanan Informasi Dalam Pemerintahan (Systematic Literature Review)*. 8(1), 454–460.
- [6] Aw, M. J. (2024). *Dampak E-Government dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan*. 1, 204–226.
- [7] Failasufa, M., Zahrani, O. P., Triasma, C., & Fuadah, L. L. (2026). *Pengaruh Transformasi Digital dan E- Government Terhadap Kepuasan Layanan Publik : Systematic Literature Review*. 5(3), 3046–3051.
- [8] Iryanto, S., Hermawan, D., Mulyatin, T., Iriani, H., Publik, I. P., & Subang, K. (2024). *" Inovasi Pelayanan Publik melalui Implementasi E-Government di Kabupaten Subang "*.
- [9] Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). *Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia*. 4(2), 134–147.
- [10] Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). *Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital*. *Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2).
- [11] Nurhidayat, Nurmandi, A., & Misran. (2024). *Evaluation of the Challenges of E-Government Implementation : Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia*. 08(02).
- [12] Pakpahan, R. T. (2026). *Implementasi E-Government dan Inovasi Pelayanan Publik di Era Artificial Intelligence*. 9(1), 283–308.
- [13] Prihartono, D. (2023). *Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance*. 14, 192–201.
- [14] Regina, A., & Kartini, D. S. (2025). *Penerapan E-Government Dalam Layanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan Di Daerah Terpencil: Evaluasi Keberhasilan Dan Kenadala*. 84–93.
- [15] Rezaldi, J. D., Maulidia, H., & Pujonggo, S. S. (2025). *Digitalisasi Dan Aksesibilitas Pelayanan Publik: Studi Pelayanan Keimigrasian Berbasis E-Government*. 10(4).
- [16] Sarjito, A., Studi, P., Pertahanan, M., Pertahanan, F. M., Pertahanan, U., & Indonesia, R. (2024). *KERANGKA STRATEGIS ADOPSI E-GOVERNMENT DALAM*. 4, 58–74.
- [17] Sugiartini, P., Tamamiyah, L., Cirebon, U. M., Islam, U., Bangsa, B., & Publik, A. (2024). *Inisiatif E-Government Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Dan*. 8(4), 950–955.
- [18] Suhartono, B., Rivai, F. H., & Wibowo, E. K. (2025). *Implementasi e-Government dalam Pelayanan Publik di Unit Layanan Administrasi pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri*. 189–204.
- [19] Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni. (2023). *Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus : Implementasi e-Government dan Hambatannya)*. *Journal Social Society*, 3(2), 80–94.
- [20] Syarif, N. A., Damayanti, R. A., Istiyansyah, M., Idris, U., Hasanuddin, U., Hasanuddin, U., & Hasanuddin, U. (2024). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan E- Government dalam Tata Kelola Keuangan Daerah berbasis Elektronik dengan Menggunakan Model TOE Framework*. 17, 226–241. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i2.33212>
- [21] Wulansari, A., & Inayati, I. (2019). *Faktor-faktor kematangan implementasi e-government yang berorientasi kepada masyarakat*. *Urnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 5(1), 24–36.
- [22] Yazid, I. D., & Karmila, A. P. (2024). *Menuju Pemerintahan Digital Unggul: Tantangan dan Transformasi Indeks E-Government di Indonesia*. 10(13), 387–396.